

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara kontekstual tidak ada ketidakjelasan hukum, namun dalam praktek menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, dan juga ada hukum acara yang tidak lengkap yaitu apakah Klausula Arbitrase boleh mengesampingkan Pasal dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 2 Politik hukum dalam menanggulangi/mangantisipasi beberapa hal yang belum diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur tentang Perjanjian Arbitrase/Klausula Arbitrase dapat mengesampingkan Pasal dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi Perjanjian Arbitrase/Klausula Arbitrase tidak boleh mengesampingkan Pasal Esensial, dan Pasal Esensial yaitu Pasal 3,5,7,9,11,70,71,72 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Pasal 11 tentang sanksi/akibat bagi para

pihak yang tidak beritikad baik selama berjalannya arbitrase sampai putusan arbitrase dan eksekusi putusan arbitrase.

B. Saran

- 1 Para pihak harus beritikad baik selama berjalannya arbitrase sampai putusan arbitrase dan eksekusi putusan arbitrase supaya terjaminnya Kepastian Hukum.
- 2 Mengamandemen/mengubah Pasal 9 dan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menanggulangi Penafsiran – penafsiran dan kelemahan arbitrase itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Ahsin Thohari, Imam Syaukani, 2015, *Dasar – Dasar Politik Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdurasyid, H.Priyatna, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Fikahati Aneska.
- Adi Nugroho, Susanti, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Adolf, Huala, 2014, *Dasar – dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*. Bandung, CV. Keni Media.
- Amriani, Numaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni, H. Sudiarto, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Bisnis*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bari, Abdul Azed., 2006, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang.
- Goodpaster, Gary dan Felix O. Soebagio., 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. Sudairto, 2015, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Harahap, Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya., 1991, *Arbitrase*, Pustaka kartini, Jakarta
- Harahap, Yahya., 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta, Sinar Grafika
- Hj.Susilawetty, 2013, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang – undangan*. Jakarta, Gramata Publishing.
- Mahfud MD, Mohammad, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Margono, Suyud, 2000, *ADR Alternatif Disputes Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Margono, Suyud., 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Margono, Suyud., 2004, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum Cetakan ke -2* , Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Marzuki, Peter Mahmud , 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 1999, *Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa, Seminar Sehari tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kerjasama Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation*. Jakarta.
- Mazuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Pranada Media group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*. Jakarta, Visimedia.
- Soemartono, Gatot., 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Subekti, R., 1980, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan Peradilan* ,Alumni, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta, Gama Media
- Syahrani, Ridwan, 1988, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung
- Syahrani, Ridwan, 2000, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung
- Umar, M. Hussyein., 1996, *Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia, Lokakarya BAPPENAS Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000*, Bandung.

Widjaja, Gunawan, 2008, *Seri Aspek Hukum Arbitrase vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (absolut) yang tidak Pernah Selesai*. Jakarta, Prenada Media

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani., 2000, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wijaya, Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Winarta, Hendra Frans, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika.

Witanto, DY, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam perkara Perdata Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung, Alfabeta.

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum

Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

PUTUSAN/YURISPRUDENSI

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2011

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 629/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 20 April 2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 862k/Pdt/2013 tanggal 2 October 2013.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/PK/pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2014

Putusan BANI Nomor 547/XI/Arb-Bani/2013 tanggal 12 Desember 2014

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/ Pdt.Arb/2015/ PN.Jkt.PSt tanggal 29 April 2015.

Putusan Mahkamah agung Nomor 97B/Pdt.Sus - Arb/2016 tanggal 18 April 2016.

